

PERANAN MODAL DALAM PENGEMBANGAN PERTANIAN

Wahab

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
Wahab.aichi88@gmail.com

Abstract

The role of capital in agriculture is one of the most important production factors after land in agricultural production in term of its contribution to production value. This study aims to determine the important role of capital in agriculture development, sources of capital for agricultural activities, and the role and function of cooperatives as economic institutions in rural areas. The method used in this research is descriptive qualitative method. This type of approach is in the form of a study of scientific books and journals from works of research and thoughts produced by researchers and practitioners. Sources of data loaded come from books, journals and articles published on the website. The development of downstream agroindustry must become the concern of corporations as part of value creation that is able to improve the welfare of stakeholders on an ongoing basis.

Keywords: The role of capital, and agriculture

Abstrak

Peran modal dalam pertanian merupakan salah satu faktor produksi yang penting setelah tanah dalam produksi pertanian dalam arti sumbangannya pada nilai produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya peranan modal dalam pengembangan pertanian, sumber permodalan bagi kegiatan pertanian, serta peran dan fungsi koperasi sebagai lembaga perekonomian di pedesaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Jenis pendekatan ini berupa kajian dari buku ilmiah dan jurnal dari karya-karya hasil penelitian dan pemikiran yang dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Sumber data yang dimuat berasal dari buku, jurnal dan article yang dimuat dalam website. Pengembangan agroindustri hilir harus menjadi perhatian korporasi sebagai bagian *value creation* yang mampu meningkatkan kesejahteraan stakeholders secara berkesinambungan.

Kata kunci: Peran modal, dan Pertanian.

PENDAHULUAN

Modal dalam usaha tani diklasifikasikan sebagai bentuk kekayaan, baik berupa uang maupun barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu secara langsung atau tak langsung dalam suatu proses produksi. Pembentukan modal bertujuan untuk

meningkatkan produksi dan pendapatan usaha tani, serta menunjang pembentukan modal lebih lanjut.

Modal adalah barang dan jasa yang bersama-sama dengan faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru. Barang-barang pertanian yang termasuk barang modal dapat berupa uang, tanah, pupuk, investasi dalam mesin, dan lain-lain. Biasanya semakin besar dan semakin baik kualitas modal yang dimiliki maka akan sangat mendukung terhadap peningkatan produksi yang dihasilkan. Masalah permodalan adalah merupakan suatu masalah utama yang dihadapi petani. Pada umumnya petani terbentur dalam masalah modal yang akan digunakan dalam meningkatkan usaha pertanian.

Meskipun banyak petani yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan hasil pertaniannya tetapi tidak mempunyai modal yang cukup sehingga petani tidak dapat mengembangkan pertaniannya lebih maju. Maka secara jelas bahwa modal merupakan faktor yang utama untuk menetukan arah perkembangan pertanian dikelola. Universitas Sumatera Utara Dalam membicarakan modal dalam pertanian orang selalu sampai pada soal kredit yang merupakan modal dari pihak luar atau lembaga keuangan. Dengan demikian modal dapat dibagi menjadi dua yaitu modal sendiri equity capital dan modal pinjaman credit.

Dalam proses produksi tidak ada perbedaan antara modal sendiri dengan modal dari pinjaman, masing- masing menyumbang secara langsung pada produksi. Bedanya pada bunga yang harus dibayar pada kreditur. Namun pelaku usaha tani yang bijaksana juga harus menghitung bunga modal yang dimilikinya sendiri, walaupun tidak perlu dibayar. Modal yang produktif adalah modal yang menyumbangkan hasil total lebih banyak dari biayanya. Esensi modal bagi pelaksanaan pembangunan pertanian menunjukkan peranan kredit pertanian sangat penting dalam pembangunan sektor pertanian.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menjelaskan beberapa pokok bahasan mengenai pembiayaan pertanian jangka panjang, modal usaha tani, dan koperasi sebagai lembaga perekonomian.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Jenis pendekatan ini berupa kajian dari buku ilmiah dan jurnal dari karya-karya hasil penelitian dan pemikiran yang dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya peranan modal dalam pengembangan pertanian, sumber permodalan bagi kegiatan pertanian, serta peran dan fungsi koperasi

sebagai lembaga perekonomian di pedesaan. Sumber data yang berasal dari buku, jurnal dan article yang dimuat dalam website.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Pertanian Jangka Panjang

Pertanian memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia. Secara konvensional, peran tersebut terkait fungsi menjaga gawang ketahanan pangan (food security), penyerap tenaga kerja, penghasil devisa, penyedia bahan baku industri, dan penjaga kelestarian lingkungan. Meskipun industri dalam jangka panjang akan menjadi *engine of growth*, tetapi besamya jumlah penduduk yang hidup di sektor semi tradisional tersebut membuat pertanian sebagai medan juang yang tak akan pernah berakhir. Transformasi struktural dari ekonomi berbasis pertanian dan sumber daya alam (*resource based*) ke arah urban-industrial tampaknya masih akan tergantung pada tingkat kesiapan sektor pertanian. Dengan kata lain, kegagalan meletakkan landasan di sektor pertanian dapat membuka peluang tidak mulusnya tahapan ekonomi babak berikutnya (Zubaidah 2016).

Pembangunan yang terpaku pada pertumbuhan dan terlalu urban bisa dengan mengandalkan industri padat modal berteknologi tinggi terbukti memiliki kemampuan sangat rendah dalam mengatasi problema ekonomi yang bersifat struktural, seperti mengatasi pengangguran dan memberantas kemiskinan. Industri semacam ini memang penting karena dengan cepat memberikan hasil berupa devisa besar, namun karena kurang memperhatikan aspek keterkaitannya dengan komunitas lokal, akhirnya menghasilkan alienasi. Tuntutan sejumlah daerah kaya sumber daya alam atas alokasi manfaat ekonomi yang lebih adil pada era otonomi sekarang setidaknya mencerminkan pentingnya penguatan pembangunan berbasis sumber daya lokal yang secara langsung terkait komunitas setempat.

Setelah belajar dari pengalaman ketidakmulasan industri dalam menopang arah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah rupanya menyadari ketidakmungkinan bagi Indonesia untuk mengabaikan pertanian begitu saja. Revitalisasi pertanian (juga perikanan dan kehutanan) dicanangkan dengan harapan mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan para stakeholdersnya secara berkesinambungan. Model pembiayaan jangka panjang yang mampu memungkinkan revitalisasi berjalan simultan berikut restrukturisasi kelembagaan petani dengan sendirinya harus dipertimbangkan secara cermat.

Meskipun teknologi memungkinkan penyesuaian dalam sistem budi dayanya, tetapi secara umum karakter dasar pertanian masih tetap melekat kuat. Karakter dasar tersebut, antara lain pola produksinya ditentukan oleh kondisi agroekosistem

(sumber daya lahan dan iklim) dan produknya voluminous. Kesesuaian lahan dan iklim menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pola budi daya di suatu daerah. Teknologi dimaksudkan untuk mengatasi muncul- nya sejumlah keterbatasan (*limiting factors*). Pemupukan misalnya, diintroduksikan guna mengatasi status hara dalam tanah yang tidak memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara optimal. Pertimbangan selanjutnya adalah manfaat ekonomi yang secara implisit tercermin pada harga jual yang menguntungkan. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi pertanian akan sangat ditentukan oleh harga pokok (*unit cost*) dan aktivitas penciptaan nilai (*value creation*) produk yang dihasilkan melalui pengolahan.

Pembiayaan pertanian tidak terlepas dari isu baru (*current issues*) yang terus bergulir pada tataran global. Isu tersebut menyangkut:

1. Semakin ketatnya kompetisi di antara para produsen, baik pada level negara, korporasi, maupun pelaku ekonomi lain. Sebagai konsekuensinya, tuntutan ke arah efisiensi dan terwujudnya precision agriculture bersifat mutlak.
2. Berkurangnya subsidi, insentif, stimulus, dan proteksi. Tekanan masyarakat internasional dan organisasi perdagangan dunia (WTO) terhadap industri gula Uni Eropa untuk segera menghentikan subsidi, baik terhadap subsidi langsung kepada petani maupun negara-negara bekas koloninya yang menjadi pengekspor gula, yang tergabung dalam Afro-Caribbean Pacific (ACP) dapat disebut sebagai salah satu contoh.
3. Pentingnya kegiatan pertanian ramah lingkungan (*environmentally friendly*), termasuk penggunaan biofertilizer dari limbah pertanian dan industri tanaman tanpa pestisida.
4. Pertanian yang lebih berbasis pada pengetahuan (*knowledge based*).
5. Peluang pertanian menghasilkan bioenergi yang bersifat terbarukan (*renewable*) dan kemungkinan menggantikan bahan bakar fosil. Dari tebu misalnya, dapat menghasilkan bioetanol, sementara sawit dan jarak untuk biodiesel.

Harus dipikirkan kembali (*rethinking*) pola pembiayaan budi daya sejumlah komoditas dalam rangka revitalisasi pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani secara keseluruhan. Skema pinjaman harus mudah dipahami petani dengan aturan sederhana.

Hendaknya disadari bahwa pada saat liberalisasi perdagangan diterapkan secara menyeluruh, tidak ada lagi subsidi atau proteksi yang dapat diberikan kepada petani dan industri lokal. Ini berarti, selama masa transisi menuju liberalisasi perdagangan harus diciptakan prakondisi khusus yang memungkinkan terjadinya peningkatan daya saing produk pertanian. Salah satu ukuran daya saing adalah

produktivitas, efisiensi, dan unit cost bersaing secara bertahap. Diperlukan back up berupa kebijakan makro yang kondusif dan memberdayakan pelaku usaha. Belajar dari inovasi gula, kebijakan tersebut berupa perlindungan dari masuknya produk impor secara membabi-butuh (bea masuk atau pembatasan impor secara ketat), adanya harga dasar untuk petani, dukungan perkreditan, serta konsistensi pemerintah dalam memberantas penyelundupan dan praktik manipulasi impor.

Pada saat liberalisasi perdagangan diterapkan, mekanisme pembiayaan lebih banyak mengacu pada perbankan komersial tanpa subsidi. Kelayakan usaha menjadi pertimbangan bagi bank ketika memutuskan bersedia membiayai atau tidak. Skala ekonomi (*economic of scale*) akan sangat menentukan keberhasilan usaha tani.

Pentingnya skala usaha mengharuskan perlunya restrukturisasi kelembagaan petani. Mungkin saja petani bergabung dalam koperasi, namun bukan dengan pola seperti masa lalu yang lebih banyak menjadi kepanjangan tangan pemerintah, tetapi benar-benar lembaga ekonomi yang mampu melayani kepentingan anggota.

Investasi baru untuk proyek-proyek pertanian dengan menarik investor memerlukan konsistensi kebijakan dan iklim usaha kondusif. Tersedianya infrastruktur fisik (jalan, jembatan, listrik, air bersih, pelabuhan), lahan yang bebas okupasi, kepastian hukum, dan lain-lain merupakan sejumlah instrumen mutlak yang harus dipenuhi. Pengembangan industri hilir dalam kerangka diversifikasi dapat dilakukan melalui aliansi strategis dengan mitra usaha yang memiliki modal, teknologi lebih maju, dan pasar. Industri hilir diyakini mampu mengurangi ketergantungan perusahaan pada harga produk tunggal yang rentan fluktuasi.

Keseluruhan mata rantai pembiayaan mencerminkan integrasi implementasi sistem agribisnis secara utuh, mulai dari industri hulu (bibit, mesin/peralatan, agroindustri), budi daya (on-farm), pengolahan (off-farm), pemasaran, penunjang (bank, riset), sampai agribisnis hilir (diversifikasi-kasi). Walaupun demikian, polanya harus mengacu pada karakteristik dan siklus usaha (3-4 bulan, 1 tahun, 5 tahun, dan lain-lain).

Pembiayaan sesuai dengan karakter dan jenis dalam pola produksi pertanian menjadi syarat yang penting bagi keberhasilan revitalisasi pertanian. Pola pembiayaan jangka panjang yang bankable hanya mungkin dilakukan bila usaha pertanian memiliki skala usaha memadai, berdaya saing tinggi, dan memiliki prospek pasar cukup kompetitif. Untuk memotivasi petani dan pelaku ekonomi agribisnis lain agar lebih fokus pada upaya peningkatan daya saing, diperlukan kebijakan proteksi dan promosi selama masa transisi menuju liberalisasi perdagangan mengingat hampir semua produk pertanian masih harus diimpor. Kebijakan proteksi menyangkut perlindungan dari masuknya produk impor secara membabi-butuh dan yang masuk secara illegal,

sedangkan kebijakan promosi berupa insentif bagi petani yang berkomitmen meningkatkan produktivitas.

Pengembangan agroindustri hilir harus menjadi perhatian korporasi sebagai bagian *value creation* yang mampu meningkatkan kesejahteraan stakeholders secara berkesinambungan. Diversifikasi hanya terwujud bila didukung oleh kebijakan lintas sektoral yang saling menguatkan (H. Rita 2010)

Modal Usaha Tani

Bagi petani di daerah pedesaan, pembentukan modal sering dilakukan dengan cara menabung (menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk keperluan masa yang akan datang). Pemerintah membantu dengan memberikan berbagai macam kredit produksi (KUT, KCK, KMKP, IDT, dan lain-lain), namun belum semuanya dimanfaatkan dengan baik, baik dari segi sasaran maupun pengelolaan (M. Rita and dkk 2022).

Sehubungan dengan pemilikan modal, petani diklasifikasikan sebagai petani besar, kaya, cukupan, dan komersial, serta petani kecil, miskin, tidak cukupan, dan tidak komersial. Dalam pengembangan pertanian, ketersediaan modal dalam jumlah cukup dan tepat waktu merupakan unsur penting dan strategis. Modal dalam bentuk uang tunai sangat diperlukan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi lebih daripada itu untuk membeli sarana produksi pertanian. Misalnya, bibit, pupuk, dan lain-lain yang memungkinkan petani melakukan proses produksi, yang selanjutnya untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan produk usaha taninya. Sumber pembiayaan tersebut dapat berasal dari lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan. Sumber pembiayaan nonperbankan yang telah berkembang, antara lain taskin agribisnis, modal ventura, laba BUMN, pegadaian, lembaga keuangan mikro, pola kontrak investasi kolektif (KIK), dan lain-lain.

Adanya krisis ekonomi, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, dan LoL antara pemerintah Indonesia dengan IMF mengakibatkan ketersediaan modal dengan suku bunga murah sangat terbatas sehingga kredit untuk usaha agribisnis mengarah ke suku bunga komersial atau bunga pasar. Sumber pembiayaan dari lembaga nonperbankan dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk usaha agribisnis. Sumber pembiayaan tersebut menerapkan pola kredit dengan suku bunga, bagi hasil, bergulir, dan lain-lain (Rita 2010).

Dari beberapa informasi yang diperoleh, petani dan pelaku agribisnis memiliki usaha yang feasible, bahkan ada yang mampu membayar harga modal 5-20% per bulan, namun seringkali petani dan pelaku agribisnis tidak bankable. Pada prinsipnya,

petani dan pelaku agribisnis lebih mengharapkan mekanisme pembiayaan yang mudah jika dibandingkan dengan pembiayaan yang murah.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan petani dan pelaku agribisnis tidak bankable, antara lain:

1. Tidak adanya kolateral (jaminan), terutama jika berhubungan dengan lembaga keuanganformal. Jaminan yang umum dimiliki adalah tanah, sementara kenyataan menyebutkan bahwa masih banyak permasalahan berkaitan dengan kepemilikan tanah. Secara umum, tidak adanya pengakuan terhadap aset yang dimiliki petani karena tidak adanya bukti hukum terhadap aset-aset tersebut.
2. Adanya track record yang buruk terhadap lembaga pembiayaan yang pernah ada, misalnya KUT (kredit usaha tani).
3. Sulitnya petani dan pelaku agribisnis lain secara langsung mengikuti formalitas yangdiharapkan pihak bank.
4. Lembaga keuangan formal kebanyakan tidak mampu mungkin juga tidak mau atau tidak mengerti dan tidak memahami sifat nature dari kegiatan pertanian, misalnya masalah gestate period, hubungannya dengan musim, dan lain-lain.

Berdasarkan beberapa faktor penyebab tidak bankable-nya petani dan pelaku agribisnis tersebut maka kendala utama pembiayaan usaha agribisnis adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya bank yang khusus untuk membiayai pertanian (Bank Pertanian).
2. Kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit ke sektor agribisnis. c. Terbatasnya lembaga penjaminan kredit untuk sektor pertanian.
3. Proses pembelajaran dari pola channeling ke pola executing.
4. Adanya program pemerintah yang sifatnya bantuan menghambat penyaluran kredit perbankan.
5. Kesan perbankan bahwa sektor agribisnis masih high risk.

Sehubungan dengan itu, strategi pengembangan pembiayaan nonperbankan dalam rangka pengembangan pertanian dapat dilakukan dengan cara:

1. Menyempurnakan kebijakan pembiayaan nonperbankan yang ada sehingga dapat dimanfaatkan lebih baik lagi oleh petani dan pelaku agribisnis.
2. Meningkatkan aksesibilitas petani dan pelaku agribisnis terhadap sumber pembiayaan nonperbankan.
3. Mensosialisasikan sumber pembiayaan nonperbankan yang telah ada.
4. Menjalin kerja sama dengan sumber pembiayaan nonperbankan, baik dalam negeri maupun luar negeri (Rita 2010).

Koperasi Sebagai Lembaga Pertanian

Koperasi Indonesia sebagai alat pendekmokrasian ekonomi nasional, berarti bahwa koperasi-koperasi harus memegang peranan aktif untuk mewujudkan tercapainya kesejahteraan hidup masyarakat terutama masyarakat yang ekonominya lemah dan disinyalir sebagian besar tersebar di pedesaan. Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Pertanian berupa Koperasi Unit Desa (KUD). Yang menjadi anggota KUD adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah unit desa yang merupakan daerah kerja KUD. Karena kebutuhan mereka beragam macam, maka KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perekonomian pedesaan memiliki dan melaksanakan fungsi:

1. Perkreditan untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja/usaha bagi anggota KUD danwarga desa umumnya.
2. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, seperti sarana sebelum dan sesudah panen, sarana untuk keperluan industri/diversifikasi produk, dan penyediaan dan penyaluran barang-barang keperluan sehari-hari khususnya 9 bahan pokok dan jasa-jasa lainnya.
3. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi/industri dari para anggota KUD dan warga desa umumnya.
4. Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangukutan dan sebagainya.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, KUD harus benar- benar mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat, dan menghindarkan kegiatan yang menyaingi anggota sendiri. KUD mempunyai banyak fungsi, karena itu KUD juga melaksanakan beraneka usaha atau serba usaha yaitu meliputi perpaduan dari kegiatan Koperasi Produksi, Koperasi Konsumsi, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa.

Sebagai urat nadi perekonomian, KUD / Koperasi Pertanian dan Koperasi pada umumnya selalu bertindak untuk melindungi mereka (petani) atau produsen yang ekonominya lemah, yang menjadi anggota koperasinya. Sehingga Koperasi Pertanian akan bermanfaat bagi petani antara lain:

1. Pemasaran hasil produksi para anggota dengan harga jual yang lebih tinggi dan atau lebih stabili.
2. Penyedia input untuk para anggota dengan harga beli yang lebih rendah dan atau lebih stabil.

Peran koperasi pertanian yang ideal adalah dapat meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani. Koperasi dapat memberikan jaminan keuntungan bagi anggota baik dari segi sosial dan ekonomi, selain itu yang utama yaitu peningkatan posisi tawar petani dapat ditingkatkan sehingga mereka mempunyai kekuatan untuk menentukan harga produk pertaniannya. Sejalan dengan itu, Kakisina & Ngutra (2020) menyatakan bahwa Koperasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya berarti anggota koperasi tersebut dapat mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial yang dihadapinya. Koperasi pertanian merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari para petani pemilik tanah, atau buruh tani dan orang yang berkepentingan serta bermata pencaharian yang berkaitan dengan usaha-usaha pertanian. Koperasi ini melaksanakan kegiatan usaha ekonomi pertanian. Selain usaha ekonomi pertanian, koperasi pertanian juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Kesejahteraan yang dimaksud yaitu dapat memfasilitasi kegiatan usaha petani, melalui pengadaan pupuk, memberikan pinjaman modal, benih, obat pemberantas hama tanaman, alat pertanian, memberi penyuluhan pertanian dan membantu menjual hasil pertanian anggota koperasi (Yonius and Liska 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, peranan modal dalam pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan untuk industri yang mengandalkan padat modal berteknologi untuk mengatasi problema ekonomi yang bersifat struktural, seperti mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta dapat memberikan hasil berupa devisa besar. Dengan adanya koperasi pertanian dapat meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani dan dapat memberikan jaminan keuntungan bagi anggota baik dari segi sosial dan ekonomi serta posisi tawar petani ditingkatkan sehingga mereka mempunyai kekuatan untuk menentukan harga produk pertaniannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Husein, Umar. 2000. *Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT. GRAMEDIA.
- Koperasi Pertanian.” *Jambura Agribusiness* 3 (2). Muhammadiyah Palembang.
- Mustopa, Marli Batubara. 2012. “Koperasi Pertanian.” *Skripsi Universitas Pertanian.*” *Jurnal DINAR Ekonomi Syariah* 1 (1).
- Rita, Hanafie. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Rita, Mariati, and dkk dkk. 2022. “Analisis Kebutuhan Modal Dan Sumber Permodahan Usahatani Padi Sawah Di Desa Jembayan Dalam.” *J. Agribisnis Koman. Pertan* 5 (1).

Yonius, Koib, and Simamora Liska. 2022. "Persepsi Petani Tentang Pentingnya Zubaidah, Nasution. 2016. "Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor